

Jenis Artikel: Penelitian Empiris

Pengaruh Pelatihan, Titel, dan Pengalaman Kerja pada Kemampuan Deteksi Kecurangan Auditor BPKP Provinsi Jawa Timur

Rieswandha Dio Primasatya* dan Aufar Fadlul Hady



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*KORESPONDENSI:

rieswandhaprimasatya@supermail.id

DOI: 10.18196/rabin.v6i2.15964

SITASI:

Primasatya, R. D., & Hady, A. F. (2022). Pengaruh Pelatihan, Titel, dan Pengalaman Kerja pada Kemampuan Deteksi Kecurangan Auditor BPKP Provinsi Jawa Timur. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 85-98.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

23 Ags 2022

Reviu:

12 Sep 2022

29 Sep 2022

Revisi:

26 Sep 2022

30 Sep 2022

Diterbitkan:

11 Okt 2022



Abstrak

Latar Belakang: Di dalam lingkungan pemerintah, kecurangan atau *fraud* dan *miss-management* kerap kali terjadi di Indonesia. Adanya *dual system* pemeriksaan (audit) dalam pemerintahan tidak menjamin bahwa kasus korupsi atau *fraud* di Indonesia akan berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kesanggupan BPKP dalam mendeteksi *fraud* di dalam tubuh pemerintah. Apakah dengan kebijakan pelatihan, sertifikasi, dan jam pengawasan (pengalaman) mampu meningkatkan kesanggupan deteksi *Fraud*.

Tujuan: Pembuatan penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh dari pelatihan, titel, dan pengalaman bekerja dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian ini memberikan sebuah ukuran yang jelas dan sistematis mengenai dampak variabel terkait pada kualitas auditor BPKP dalam mendeteksi *fraud*.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan mengumpulkan kuisioner dari beberapa instansi BPKP. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik *Partial Least Square* (PLS).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menjelaskan terdapat hubungan positif antara Pelatihan (*training*), gelar (*title*), dan juga pengalaman kerja (*experience*) pada kesanggupan auditor Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mendeteksi adanya kecurangan (*Fraud Detection*). Pelatihan kepada auditor BPKP dapat meningkatkan kesanggupan mendeteksi kecurangan sebesar 27,1%. Titel dapat meningkatkan kesanggupan auditor BPKP dalam mendeteksi kecurangan sebesar 42,2%. Sedangkan pengalaman kerja dapat meningkatkan kesanggupan deteksi *fraud* sebesar 34,8%.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian ini adalah *scope* penelitian yang hanya dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur. Penelitian selanjutnya dapat menguji kesanggupan deteksi *fraud* dalam aspek yang lain seperti suku, kapasitas pengetahuan, dan personality auditor. Hal ini dilandasi oleh kecenderungan temuan hasil audit sesuai dengan personality auditor di lingkungan BPKP.

Keaslian/Novelty Penelitian: Penelitian ini membuktikan bahwa pelatihan, titel dan pengalaman kerja mampu meningkatkan kesanggupan mendeteksi kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu kebijakan beasiswa pelatihan dan sertifikasi harus tetap dilanjutkan.

Kata kunci: BPKP; Fraud; Training; Title; Experience

Pendahuluan

Fraud merupakan permasalahan utama dalam dunia akuntansi dan bisnis (Beasley & Chu, 1996; Beasley dkk., 2000). Fraud dapat ditemukan melalui mekanisme pemeriksaan audit (Luca & Zervas, 2016). Pemeriksaan (audit) terhadap pelaporan keuangan dan aktivitas sebuah entitas telah berlangsung sejak masa mesopotamia (Macve, 2015). Pada masa itu, petugas yang bertanggung jawab untuk melaporkan persediaan makanan masyarakat kemudian di periksa oleh hakim atau petugas lainnya yang di perintah oleh kaisar. Praktik audit terus berlangsung hingga munculnya standar audit untuk pemerintah (sektor publik) di Australia tahun 1980an (Bunn dkk., 2017).

Khusus dalam pelaporan keuangan pemerintah Indonesia, dalam ruang lingkup pusat maupun pemerintah daerah. Pemeriksa (auditor) yang bertugas terdiri atas auditor eksternal dan auditor internal (Hasthoro & Sunardi, 2016). Fungsi dari eksternal auditor dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan internal auditor dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Musa, 2020). Peran ini mengadopsi prinsip *governance* dimana pengawasan terhadap aktivitas pemerintah dilaksanakan secara internal maupun eksternal.

Di dalam lingkungan pemerintah, *fraud* dan *miss-management* kerap kali dijumpai di negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah kejadian kasus korupsi yang cukup banyak dan diketahui oleh masyarakat tidak hanya pada pemerintah pusat, namun sampai ke pemerintah daerah dan desa (Setiadi, 2018). Dalam kurun waktu 2017 – 2021 terdapat 14 kepala daerah di Jawa Timur yang tertangkap tangan oleh KPK (Detik, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah daerah yang diperiksa oleh Auditor Pemerintah dan mendapatkan hasil tidak ditemukan kecurangan, menjadi bebas dari korupsi ?. Perilaku korupsi yang telah membudaya menjadi tugas berat seorang auditor pemerintah dalam mendeteksi, mencegah, mengoreksi, hingga memberikan rekomendasi sanksi terhadap perangkat pemerintah yang telah terbukti melakukan fraud.

Fenomena di atas menjadi sebuah ironi dimana keberadaan audit tidak menjamin bahwa suatu daerah bebas dari praktik Korupsi. Adanya *dual system* pemeriksaan (audit) dalam pemerintahan tidak menjamin bahwa kasus korupsi atau *fraud* di Indonesia akan berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kesanggupan BPK dan BPKP dalam mendeteksi *fraud* di dalam tubuh pemerintah. Disisi lain, auditor senior BPKP memiliki pelatihan yang cukup, gelar yang memadai, dan pengalaman kerja yang panjang. Menurut Hambali (2017) dan Sihombing (2019) menyebutkan bahwa pelatihan kepada auditor BPK mampu meningkatkan kesanggupan auditor dan kualitas audit. Sedangkan penelitian dari Ab Wahid dan Grigg (2021) membuktikan bahwa sertifikasi auditor diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit yang diberikan.

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPKP adalah memberikan kesempatan bagi auditor terbaiknya untuk menempuh pendidikan magister melalui program *State Accountability Revitalization* (STAR). Program ini menasar pada peningkatan tingkat pendidikan dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas audit para auditornya. Namun beasiswa ini dihentikan pada tahun 2018 dan sampai sekarang belum dilaksanakan kembali. Sejauh ini BPKP hanya melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk menyegarkan

informasi dan kesanggupan para auditornya. Selain itu jam kerja auditor BPKP juga mendapatkan atensi untuk menentukan kualitas auditor dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga penelitian bertujuan untuk dapat menguji variabel pelatihan, titel dan juga pengalaman kerja berpengaruh pada kesanggupan auditor pada deteksi kecurangan. Pelatihan dan juga pengalaman kerja dari auditor memiliki pengaruh positif terhadap kesanggupan auditor untuk melakukan deteksi kecurangan (Cahan & Sun, 2015). Penelitian ini mengimplikasikan bahwa auditor BPR mampu meningkatkan kesanggupan deteksi fraud jika diiringi dengan pelatihan dan pengalaman kerja yang lama.

Berdasarkan penelitian Hambali (2017), Sihombing (2019), Ab Wahid dan Grigg (2021), Cahan dan Sun (2015), maka belum ada penelitian yang menguji pengaruh pelatihan, titel, dan pengalaman para auditor pada kesanggupan mendeteksi *fraud* institusi BPKP sehingga menjadi *Gap* dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini menguji Bagaimana dampak dari pelatihan, titel, dan pengalaman kerja auditor Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada kesanggupan dalam mendeteksi *fraud* laporan keuangan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya hubungan positif antara Pelatihan (*training*), gelar (*title*), dan pengalaman kerja (*experience*) kepada kesanggupan auditor Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mendeteksi adanya kecurangan (*Fraud Detection*). Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas auditor BPKP dengan memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas pelatihan dan memfasilitasi auditor BPKP untuk ikut mengambil sertifikasi profesi. Kebaruan yang terdapat pada penelitian adalah belum adanya penelitian dengan pengujian pengaruh pelatihan, gelar (*title*), dan pengalaman, terhadap kesanggupan auditor dalam mendeteksi Kecurangan.

Tinjauan Literatur

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan pertama kali adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*Principle*) dengan pengurus perusahaan (*Agent*) yang selanjutnya disebut dengan *Agency Problem*. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan tata kelola dan pengawasan yang baik agar *agent* dapat memberikan informasi yang relevan dan reliabel kepada *principle*. Salah satu instrumen untuk menjaga agar informasi yang disajikan relevan dan reliabel melalui pemeriksaan atau audit.

Audit dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pelaksanaan audit tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan saja namun dapat diperluas pada audit aktivitas maupun audit kepatuhan (*compliance*). Luaran (*output*) dari audit dapat berupa opini dan rekomendasi kepada *principle* dan *stakeholder* lainnya yang dapat membantu pengambilan suatu keputusan secara tepat.

Pada penelitian ini, Rakyat merupakan *principle* dan Pemerintahan adalah *agent* yang melaksanakan amanat dari Rakyat. Untuk menjaga transparansi informasi dari pemerintah, maka diperlukan auditor baik eksternal maupun internal. BPKP berperan

sebagai auditor internal pemerintah yang bertugas untuk menjaga agar tata kelola pemerintahan dan laporan keuangan telah disajikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Triangle Fraud Theory

Cressey (1953) menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1) faktor tekanan; (2) adanya peluang dan (3) adanya rasionalisasi. Sedangkan Abbasi dkk (2012) menyebutkan faktor-faktor tekanan yang dirasakan yang memicu individu untuk melakukan kecurangan berupa dorongan finansial, perilaku tidak etis (keburukan), tekanan dari pekerjaan, dan faktor lainnya seperti tingginya tingkat gaya hidup. Faktor peluang yang dirasakan akan mendorong terjadinya kecurangan dikarenakan lemahnya sistem pencegahan dan pendeteksi perilaku kecurangan, ketidakmampuan dalam menilai kualitas dari kinerja seseorang, ketidakmampuan dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku kecurangan, minimalnya informasi yang dapat diperoleh, penelantaran, ketidakpedulian dan ketidakmampuan serta minimnya audit (Abbasi dkk, 2012).

Seseorang yang melakukan fraud disebabkan oleh Rasionalisasi yang dipengaruhi oleh karakteristik seseorang. Abbasi dkk, (2012) menyatakan bahwa sebagian besar pelaku kecurangan adalah seseorang dengan latar belakang baik dan telah bekerja untuk sebuah perusahaan di mana ia telah melakukan fraud untuk waktu yang lama. Pelaku fraud bukanlah orang yang memiliki kebiasaan melakukan kejahatan (*habitual criminal*). Pelaku fraud adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan terhadap organisasinya, sehingga harus membangun rasionalisasi agar mendapatkan pembenaran dari setiap tindakannya. Rasionalisasi dapat berbentuk perasaan pegawai atau pihak manajemen atas rasa tidak puas dengan pekerjaannya. Rendahnya tingkat pengakuan atas pekerjaan, kompensasi yang tidak sesuai dan lain sebagainya (Abbasi dkk, 2012).

Hubungan antara Pelatihan (*Training*) dengan *Fraud Detection*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pelatihan adalah proses belajar dan membiasakan diri untuk dapat melakukan sesuatu. Kegiatan diklat yang terdiri dari Pendidikan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan dapat dimaksimalkan dengan menjadi anggota dalam asosiasi profesi (SAIPI, 2014). Pelatihan dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya auditor agar lebih memahami, lebih mampu dan lebih terampil dalam melaksanakan tugas audit. Pelatihan yang diikuti oleh auditor secara berkesinambungan mendorong pemahaman auditor untuk tetap terjaga dengan baik. Auditor didorong untuk mengikuti perkembangan modus operasi dan gejala fraud.

Novita (2015) menjelaskan bahwa variabel pelatihan dapat diukur melalui jumlah pelatihan yang diikuti oleh responden. Rahayu dan Gudono (2016) menyebutkan jika pelatihan dibidang audit kecurangan diselenggarakan dengan tujuan agar auditor memiliki kemampuan mulai dari memahami, hingga menerapkan terkait teknik investigasi dengan lebih detail. Audit sering kali dilaksanakan oleh individu maupun kelompok dengan keahlian teknis dan pelatihan yang memadai. Melalui pelatihan teknis audit *fraud*,

seorang auditor diharapkan dapat memahami ketentuan baru, metodologi baru, teknik audit investigatif, mode *fraud* baru dan identifikasi risiko *fraud*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *training* dan *fraud detection*. Drogalas dkk. (2017), Hamdan dkk. (2017) dan Sihombing dkk. (2019) membuktikan terdapat hubungan positif antara *training* dan *fraud detection*. Kondisi ini terjadi karena *training* bertujuan untuk meningkatkan skill teknis auditor dalam melakukan audit (Wang dkk, 2018). Dalam konteks BPKP, Training bertujuan untuk mengingat kembali (*refresh*), *updating* informasi, dan peningkatan skill auditor. Sehingga dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Training memiliki pengaruh positif pada deteksi kecurangan auditor BPKP.

Hubungan antara Title dan Fraud Detection

Mitigasi kecurangan dapat dilakukan dalam beberapa tindakan diantaranya minimalisir potensi penyebab terjadinya kecurangan. Menurut *Statements on Internal Auditing Standards* nomor 3 bagian *Detection, Investigation and Reporting Fraud* menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam mendukung pencegahan kecurangan dengan cara menguji dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal sesuai dengan tingkat kerugian atau risiko yang potensial dalam berbagai segmen kegiatan organisasi. Pengetahuan mengenai jenis, potensi, dan cara koreksi *Fraud* didapatkan baik dari pengalaman maupun pendidikan. Justifikasi pendidikan pengetahuan *Fraud* sering kali dilihat dari seberapa banyak gelar yang didapatkan.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dan literasi keuangan dengan *Fraud Detection* (Engels dkk., 2019). Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan biasanya memiliki standar kompetensi kelulusan yang di verifikasi oleh pihak ketiga. Oleh karena itu penelitian ini menguji pengaruh gelar terhadap kesanggupan deteksi *Fraud* untuk pegawai BPKP.

H₂: Title berpengaruh positif terhadap Fraud Detection Pegawai BPKP.

Hubungan antara Experience dan Fraud Detection.

Menurut Novita (2015), seberapa lama pengalaman dari seorang auditor dapat diasumsikan sebagai pembelajaran yang diperoleh seorang auditor tersebut melalui pendidikan formal yang dijalannya atau dari pengalaman yang diperoleh selama penugasan. Pengalaman yang diukur dengan indikator lama bekerja sebagai auditor dan menemukan kasus-kasus kecurangan selama berprofesi sebagai auditor (Novita, 2015). Seorang auditor yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit memiliki pengetahuan dalam menentukan titik kritis dalam melakukan kegiatan audit. Sedangkan bagi auditor junior dapat memiliki pemahaman terkait dengan titik kritis suatu objek penugasan audit melalui forum diskusi atau mempelajari referensi yang telah disediakan. Sulistyowati dan Supriyati, (2015), Surya dkk. (2021) serta Agustina dkk. (2021)

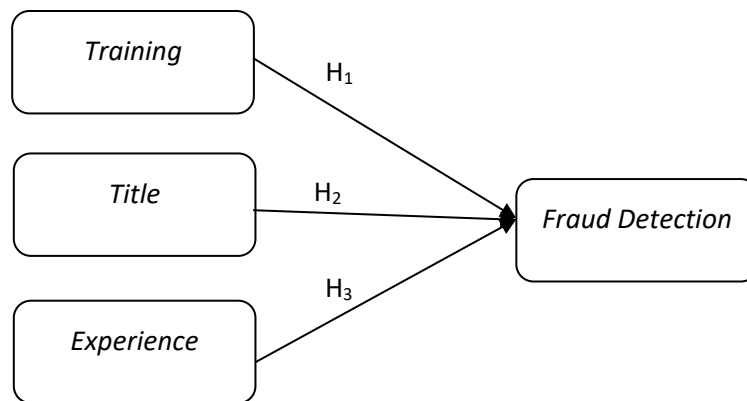
Primasatya & Hady

Pengaruh Pelatihan, Titel, dan Pengalaman Kerja pada ...

membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara pengalaman (*experience*) dan *Fraud Detection*. Jika auditor lebih banyak bekerja di bidang pemeriksaan, auditor akan lebih terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam konteks auditor BPKP, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Experience berpengaruh positif terhadap Fraud Detection Pegawai BPKP.

Berdasarkan penurunan hipotesis dapat diperoleh metode penelitian pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor dari tingkat madya, muda, pertama, penyelia, pelaksana lanjutan, pelaksana pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Jumlah populasi sebesar 212 karyawan tetap dan sampel yang diambil adalah 100 orang. Teknik *sampling* yang dipergunakan ialah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2012) metode *Purposive Sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang dipilih adalah (1) Jabatan Fungsional sebagai Auditor, (2) Angka kredit minimal 60 poin. Berdasarkan kriteria ini terkumpul 130 responden dan hanya 100 responden yang mengembalikan kuesioner yang dibagikan.

Data pada penelitian adalah kuantitatif dalam bentuk kuesioner dengan nilai atas respons dari responden terkait pertanyaan yang ada. Sumber data adalah data primer melalui jawaban dari responden dalam hal ini adalah auditor pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Variabel yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari Variabel Dependen dan juga Variabel Independen. Variabel dependen yang dibahas pada penelitian adalah Deteksi Kecurangan (*Fraud Detection*). Kemampuan auditor dalam deteksi kecurangan diukur melalui kemampuan auditor dalam mendeteksi *red flags* yang telah dikembangkan oleh DiNapoli (2008).

Masing-masing responden diharuskan menjawab setiap pertanyaan dengan skala likert 5 poin. Untuk alat ukur setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Alat Ukur Variabel

No	Variabel	Alat Ukur
1	Pelatihan (Training)	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi mengikuti pelatihan dibidang audit dan keuangan • Frekuensi mengikuti pelatihan dibidang non audit dan keuangan • Frekuensi menjadi struktur pelatihan
2	Gelar (Titel)	<ul style="list-style-type: none"> • Jenjang Pendidikan Formal • Jumlah Sertifikasi Resmi yang pernah di ikuti
3	Pengalaman (Experience)	<ul style="list-style-type: none"> • Durasi bekerja di BPKP • Durasi kenaikan jabatan • Jumlah angka kredit
4	Kesanggupan deteksi Fraud	<ul style="list-style-type: none"> • Kesanggupan mengumpulkan bukti audit • Kesanggupan menyusun program audit • Tingkat kewaspadaan • Tingkat skeptis • Pengetahuan tentang <i>fraud</i>

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri atas gelar (*Title*), pengalaman kerja auditor (*Experience*), dan pelatihan yang diberikan kepada auditor (*Training*). Pengalaman dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang auditor. Indikator pengukuran dari variabel pengalaman sebagai berikut: (1) Masa kerja sebagai fungsional auditor; (2) Jumlah kasus kecurangan yang dapat ditemukan selama menjalani profesi sebagai fungsional auditor. Variabel pelatihan berfungsi sebagai media pengembangan SDM, terutama dalam hal pengetahuan (*task-specific knowledge*), kesanggupan (*ability*) dan keahlian (*skill*). Pelatihan dalam penelitian ini berupa pelatihan dengan materi tentang fraud auditing, pelatihan pengembangan akuntansi dan audit, pelatihan tentang pelaksanaan hukum. Variabel pelatihan diukur dengan berapa kali responden mengikuti pelatihan yang disebutkan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dari 100 responden BPKP di Provinsi Jawa Timur mendapatkan hasil yang cukup baik. 130 Kuisisioner yang disebar dapat dikumpulkan kembali sebanyak 100 atau 76% (Tabel 2). Berikut adalah analisis statistik deskriptif, analisis data, evaluasi *outer model*, uji validitas dan reliabilitas, uji struktural model, dan Uji Hipotesis.

Tabel 2 Demografi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Jabatan	Jumlah Responden
Pria	47	Auditor Pelaksana	31
Wanita	53	Auditor Pertama	42
		Auditor Muda	13
		Auditor Madya	14
Jumlah	100	Jumlah	100

Keseluruhan respons dari responden yang ada dinilai sesuai dengan skala jawaban responden yang tercantum dalam Tabel 3, dengan deskripsi data sebagai berikut:

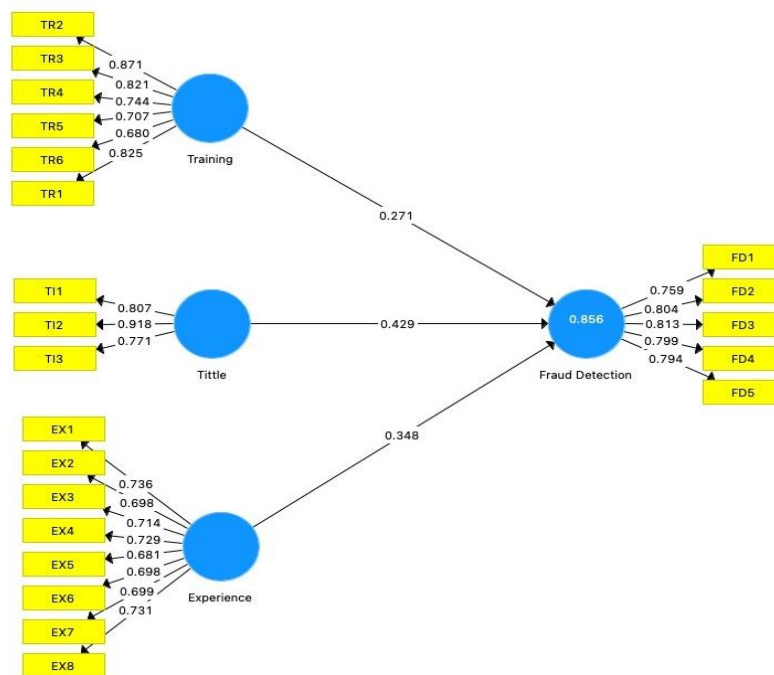
Tabel 3 Deskripsi Jawaban Responden

Variabel	Mean	Median	Theoretical Range
Experience	4,41	4	1-5
Fraud Detection	4,41	4	1-5
Tittle	4,34	4	1-5
Training	4,41	4	1-5

Berdasarkan Tabel 3, mayoritas responden memilih jawaban Setuju yang dibuktikan dengan skala likert 4 pada seluruh variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa Pelatihan, Titel, tingkat pengalaman, yang diterapkan kepada pegawai BPKP bernilai cukup baik. Di samping itu, diperoleh *mean* jawaban setuju untuk variabel kesanggupan mendeteksi kecurangan (*Fraud Detection*) yang berarti apabila semakin banyak jawaban setuju yang disampaikan oleh responden, maka akan semakin tinggi tingkat kesanggupan mendeteksi kecurangan pegawai BPKP.

Evaluasi Outer Model

Langkah berikutnya adalah memilih model untuk penelitian yang sesuai, yang berikutnya digunakan sebagai alat analisis pada hipotesis yang telah ditetapkan. Penilaian estimasi indikator konstruk digunakan melalui aplikasi SmartPLS. Fiala dan Duncan-Owens (2012) menyatakan pengukuran yang menggunakan indikator refleksif yang dapat mengacu hubungan antara nilai komponen dengan nilai konstruk yang dilakukan perhitungan. Pengukuran indikator refleksif dapat diasumsikan bernilai tinggi apabila memiliki korelasi diatas 0,70 dengan variabel konstruk yang terukur. *Construct outer model* disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2 Construct Outer Model

Gambar 2 menjelaskan model penelitian dan menggambarkan *construct outer model* dari setiap variabel yang di uji. Sesuai dengan teori Fiala dan Duncan-Owens (2012) maka hampir semua *construct* telah memenuhi persyaratan kecuali TR6, EX5, EX6, EX7. Peneliti memutuskan untuk tetap mempertahankan *construct* tersebut dengan menimbang tingkat skor masih diatas 0,6 sehingga masih bisa di gunakan untuk menguji pengaruh antar variabel.

Gambar 1 juga menjelaskan pengaruh antar variabel *Training, Title, dan Experience* terhadap *Fraud Detection* pegawai BPKP. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada hubungan *Training, Title, dan Experience* terhadap *Fraud Detection* yang dibuktikan dengan skor 0,271; 0,429; 0,348.

Uji validitas dan reliabilitas

Pengujian validitas diperlukan dengan tujuan mencari kecermatan maupun ketepatan data sehingga hasil dari penelitian dapat dikatakan tidak mengandung bias. Pengujian validitas sendiri dibagi menjadi pengujian validitas konvergen dan pengujian validitas diskriminan. Uji validitas konvergen diperlukan untuk melihat outer loading. Pada Tabel 5 telah disajikan nilai *loading factor* pada tiap indikator *construct* dengan nilai yang cukup tinggi, sedangkan dalam menilai validitas konvergen terdapat kriteria yaitu nilai dari *loading factor* harus lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil uji validitas konvergen tersebut, dapat disimpulkan hasil penelitian ini diterima.

Diluar dari uji validitas, juga diperlukan uji reliabilitas yang mana berguna untuk melakukan evaluasi terhadap *outer model* melalui pengamatan terhadap reliabilitas konstruk variabel laten yang dilakukan pengukuran menggunakan kriteria sebagai berikut: *cronbach alpha* dan *composite reliability*. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan smartPLS disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 *Quality Criteria*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Experience	0,861	0,864	0,891	0,505
Fraud Detection	0,853	0,853	0,895	0,630
Tittle	0,778	0,787	0,872	0,696
Training	0,868	0,876	0,901	0,605

Construct dapat dikatakan memenuhi syarat uji reliabilitas apabila memiliki nilai pada *cronbach alpha* dan juga *composite reliability* lebih besar dari 0,7. Menurut Neuman (2006), Uji reliabilitas yang memiliki nilai diatas 0,7 tersebut menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan dan juga kekonsistenan dari alat ukur yang digunakan dalam melakukan suatu pengukuran. Pada hasil uji yang tersaji dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai diatas 0,7 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai konstruk dapat dianggap akurat serta dari sisi responden memiliki tingkat konsisten yang cukup tinggi dalam menjawab item pertanyaan pada kuesioner atau instrumen.

Uji Struktural Model

Langkah berikutnya adalah melakukan Uji Struktur Model melalui pengamatan pada nilai *R-Square* (R^2) dari *construct* endogen. Hasil Uji Struktural Model disajikan pada Tabel 5 memiliki nilai *R-square construct* pada variabel Pelatihan, Title, Pengalaman, dan Deteksi Kecurangan dapat menjelaskan *R-Square* (R^2) sebesar 85,6% varian pada pengukuran keseluruhan deteksi kecurangan, sedangkan sebesar 14,4% deteksi kecurangan dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Table 5 Inner Model (R-Square)

	R Square	R Square Adjusted
Fraud Detection	0,856	0,852

Sedangkan pada Tabel 6 disajikan nilai sejauh mana hipotesis yang ditetapkan memiliki keterkaitan. Melakukan uji *inner model* bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antar konstruk. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat berdasarkan nilai *T-Statistics* dari hubungan antar variabel laten. Apabila *T-Statistics* memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan *T-Table*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis terdukung.

Table 6 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)
Experience->Fraud Detection	0,348	0,350	0,103	3,398
Tittle->Fraud Detection	0,429	0,426	0,112	3,839
Training->Fraud Detection	0,271	0,270	0,089	3,060

Tabel 6 menunjukkan bahwa pengaruh variabel *training*, *tittle* dan *experience* terhadap *Fraud Detection* memiliki hasil positif signifikan yang ditandai dengan nilai P Values dibawah 5%. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa *training*, *tittle*, *experience* berpengaruh positif terhadap *Fraud Detection*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung dan signifikan antara pelatihan (*training*) dengan kesanggupan auditor BPKP dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud Detection*) sebesar 27,1%. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahayu dan Gudono (2016) yang membuktikan bahwa *training* dapat meningkatkan kesanggupan auditor dalam mendekteksi *fraud* di Lembaga pemerintahan. Hasil ini sejalan dengan teori *Triangle Fraud* dimana pelatihan (*training*) bertujuan untuk menghilangkan rasionalisasi dan memperkecil peluang atas perilaku *fraud* dalam institusi pemerintah

Pada praktiknya auditor BPKP mendapat pelatihan setiap bulan dengan berbagai macam topik untuk memperluas wawasan dan kesanggupan auditor. Ruang lingkup pelatihan tidak hanya terbatas pada auditor pelaksana dan auditor pertama saja, namun juga mencakup jenjang auditor muda, madya, dan utama. Pelatihan kepada seluruh jenjang auditor bertujuan untuk meningkatkan kesanggupan BPKP dalam menyelamatkan keuangan negara. Dalam tahun 2021 jumlah penyelamatan keuangan negara yang

dilakukan oleh BPKP sebesar Rp 6,4 Triliun, efisiensi pengeluaran negara sebanyak 44,1 Triliun dan optimalisasi pendapatan sebanyak 3,8 Triliun.

Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa program sertifikasi auditor BPKP yang di validasi oleh pihak ketiga (eksternal) dan mendapatkan gelar (*title*) mampu meningkatkan kesanggupan auditor BPKP dalam mendeteksi *fraud* sebesar 42,9. Pencapaian tersebut juga didukung oleh program sertifikasi dari BPKP untuk para-auditor. BPKP secara rutin memberikan 100 sertifikasi kepada auditor secara bergilir. Alasan BPKP selalu memberikan sertifikasi kepada auditornya adalah karena kepercayaan bahwa auditor yang telah melalui sertifikasi akan meningkatkan kesanggupan mendeteksi kecurangan apalagi telah di validasi oleh pihak ketiga (pemberi sertifikasi). Jenis sertifikasi yang di ikuti oleh auditor BPK seperti *Certified Fraud Examiner (CFE)*, *Certified Forensic Auditor (CFrA)*, *Certified Accountant (CA)*, *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Associate Certified Public Accountant (ACPA)*, *Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)*, *Certified State Finance Auditor (CFA)*, *Certified Management Accounting (CMA)*. Adapun persentase jenis sertifikasi yang dimiliki oleh auditor BPKP dapat dilihat pada Tabel 7.

Table 7 Persentase Jenis Sertifikasi yang dimiliki oleh auditor BPKP

No	Jenis Sertifikasi	Jumlah	Persentase
1	Certified Forensic Auditor (CFrA)	23 Orang	23%
2	Sertifikasi Manajemen Risiko (MR)	8 Orang	8%
3	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	13 Orang	13%
4	Certified Accountant (CA)	18 Orang	18%
5	International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)	2 Orang	2%
6	Magister Economic Development (M.Ec Dev)	2 Orang	2%
7	Magister Manajemen	2 Orang	2%
8	Lain-lain	32 Orang	32%

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor (*experienced*) mampu meningkatkan kesanggupan deteksi *fraud* sebesar 34,8%. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hilmi (2011) yang menyebutkan bahwa pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kesanggupan kerja auditor. Dalam praktiknya, Auditor berpengalaman (*Experienced Auditor*) memiliki banyak referensi kasus yang telah ditangani sehingga dapat meningkatkan kesanggupan mendeteksi *fraud*. Dalam konteks relasi, auditor yang memiliki pengalaman yang tinggi memiliki relasi yang lebih kuat terutama pihak penegak hukum seperti polisi. Di dalam internal BPKP, terdapat deputi khusus yang menangani investigasi kasus kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan daerah. Deputi ini harus dijabat oleh auditor berkesanggupan khusus dan berpengalaman dalam memecahkan kasus kecurangan keuangan di daerah.

Pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman auditor BPKP terbukti dapat meningkatkan kesanggupan mendeteksi kecurangan (*fraud*) dalam instansi pemerintah. Peran BPKP terbukti mampu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada *scope* penelitian yang hanya dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur. Penelitian selanjutnya dapat menguji kesanggupan deteksi *fraud* dalam aspek yang lain seperti suku, kapasitas pengetahuan, dan personality auditor. Hal ini dilandasi oleh kecenderungan temuan hasil audit sesuai dengan personality auditor di lingkungan BPKP.

Kesimpulan

Fraud merupakan permasalahan utama dalam dunia akuntansi dan bisnis. Dalam konteks operasional pemerintahan di Indonesia, fungsi audit internal pemerintah dilaksanakan oleh BPKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun keberadaan BPKP tidak menjamin bahwa pemerintahan bebas dari segala bentuk *Fraud* dan *Miss-management*.

Pada praktiknya auditor BPKP telah memiliki banyak pengalaman dan dibekali oleh banyak pelatihan dan sertifikasi. Namun apakah aktivitas ini berpengaruh terhadap kesanggupan auditor BPKP dalam mendeteksi *Fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelatihan, titel, dan pengalaman bekerja dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian ini memberikan sebuah ukuran yang jelas dan sistematis mengenai dampak variabel terkait pada kualitas auditor BPKP dalam mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan (*Training*), Titel (*Tittle*), dan Pengalaman (*Experience*) berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan Auditor BPPKP dalam mendeteksi Fraud.

Penelitian ini merupakan *initial research* yang mengkaji hubungan pelatihan, gelar (titel), dan pengalaman kerja auditor pada kesanggupan dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud Detection*). Oleh karena itu penelitian ini berkontribusi pada pengambilan kebijakan BPKP dalam mengadakan kembali fasilitas beasiswa dan pelatihan rutin bagi auditor BPKP agar kualitas audit dapat terus terjaga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada *scope* penelitian yang hanya dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur. Penelitian selanjutnya dapat menguji kesanggupan deteksi *fraud* dalam aspek yang lain seperti suku, kapasitas pengetahuan, dan personality auditor. Hal ini dilandasi oleh kecenderungan temuan hasil audit sesuai dengan personality auditor di lingkungan BPKP.

Daftar Pustaka

- Ab Wahid, R., & Grigg, N. P. (2021). QMS external quality auditors' education framework: findings from an iterative Delphi study. *The TQM Journal*. <https://doi.org/10.1108/tqm-03-2021-0091>
- Abbasi, A., Albrecht, C., Vance, A., & Hansen, J. (2012). Metafraud: a meta-learning framework for detecting financial fraud. *Mis Quarterly*, 1293-1327. <https://doi.org/10.2307/41703508>

- Agustina, F., Nurkholis, N., & Rusydi, M. (2021). Auditors' professional skepticism and fraud detection. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(4), 275–287. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1214>
- Beasley, J. E., & Chu, P. C. (1996). A genetic algorithm for the set covering problem. *European Journal of Operational Research*, 94(2), 392–404. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(95\)00159-x](https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00159-x)
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms. *Accounting Horizons*, 14(4), 441–454. <https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.4.441>
- Bunn, M., Pilcher, R., & Gilchrist, D. (2017). Public sector audit history in Britain and Australia. *Financial Accountability & Management*, 34(1), 64–76. Portico. <https://doi.org/10.1111/faam.12143>
- Cahan, S. F., & Sun, J. (2014). The Effect of Audit Experience on Audit Fees and Audit Quality. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 30(1), 78–100. <https://doi.org/10.1177/0148558x14544503>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- DiNapoli, T. P. (2008). *Red flags for fraud*. State of New York Office of the State Comptroller.
- Drogalas, G., Pazarskis, M., Anagnostopoulou, E., & Papachristou, A. (2017). The effect of internal audit effectiveness, auditor responsibility and training in fraud detection. *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 16(4), 434–454. <https://doi.org/10.24818/jamis.2017.04001>
- Engels, C., Kumar, K., & Philip, D. (2019). Financial literacy and fraud detection. *The European Journal of Finance*, 26(4–5), 420–442. <https://doi.org/10.1080/1351847x.2019.1646666>
- Fiala, T. J., & Duncan-Owens, D. (2012). A Review of “Education and the Cold War: The Battle for the American School.” *Educational Studies*, 48(4), 394–399. <https://doi.org/10.1080/00131946.2011.647158>
- Hambali, D. (2017). Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Pelatihan Teknis dan Supervisi Terhadap Kualitas Audit BPK. *Jurnal Tambora*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.36761/jt.v2i2.158>
- Hamdan, S. L., Jaffar, N., & Ab Razak, R. (2017). The effect of competency on internal auditors' contribution to detect fraud in Malaysia. *International Journal of Applied Business and Economic Research* 15(24), 369-388.
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 53-68. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Hilmi, F. (2011). Pengaruh Pengalaman, Pelatihan dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405x\(76\)90026-x](https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x)
- Luca, M., & Zervas, G. (2016). Fake It Till You Make It: Reputation, Competition, and Yelp Review Fraud. *Management Science*, 62(12), 3412–3427. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2304>
- Macve, R. H. (2015). Fair value vs conservatism? Aspects of the history of accounting, auditing, business and finance from ancient Mesopotamia to modern China. *The British Accounting Review*, 47(2), 124–141. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.001>
- Musa, A. M. (2020). The Existence of the State Audit Board of the Republic of Indonesia in the Presidential System. *International Journal of Entrepreneurship*, 24(5), 1-9.

- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc..
- Novita, U. (2015). The Effect of Experience, Workload, and Training on Skepticism and the Auditor's Ability to Detect Fraud (Empirical Study at the Auditor in the Representative Office of Riau Province BPKP). *JOM Fekon*, 2(1), 112-131.
- Rahayu, S., & Gudono, G. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan: Pendekatan Explanatori Sequential. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di indonesia penyebab, hambatan, solusi dan regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262. Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234>
- Sihombing, E. (2019). Pengaruh Akuntansi Forensik, Pelatihan, Pengalaman, Beban Kerja, dan Skeptisme Profesional Terhadap Kesanggupan Auditor Mendeteksi Fraud (Studi Empiris pada BPK Perwakilan, BPKP Perwakilan dan Inspektorat Provinsi di Sumatera Utara). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Sihombing, E., Erlina, R., & Muda, I. (2019). The effect of forensic accounting, training, experience, work load and professional skeptic on auditors ability to detect of fraud. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 474-480.
- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, L., & Supriyati, S. (2016). The effect of experience, competence, independence, and professionalism of auditors on fraud detection. *The Indonesian Accounting Review*, 5(1), 95-110. <https://doi.org/10.14414/tiar.v5i1.494>
- Surya, A. H. W. J., Lannai, D., & Amiruddin, A. (2021). Effect of Integrity, Work Experience and Compensation on Fraud Detection Through Professional Skepticism. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(3), 192 - 211. Diakses dari <https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa/article/view/149>
- Wang, H., Zhu, P., Zou, X., & Qin, S. (2018). An Ensemble Learning Framework for Credit Card Fraud Detection Based on Training Set Partitioning and Clustering. *2018 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced & Trusted Computing, Scalable Computing & Communications, Cloud & Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation (SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCOM/IOP/SCI)*. <https://doi.org/10.1109/smartworld.2018.00051>